

Perancangan Kantor Bupati dengan Pendekatan *Institutional Design* di Pusat Pemerintahan Baru Kabupaten Agam Tuo

Idul Febrianda¹

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Universitas Bung Hatta

Email: idulfebrianda@gmail.com

I Nengah Tela²

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Universitas Bung Hatta

Email: nengah tela@bunghatta.ac.id

Al Busyra Fuadi³

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Universitas Bung Hatta

Email: albusyrafuadi@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Pemekaran Kabupaten Agam yang akan dibagi menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Agam dan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Agam Tuo menjadi isu yang menarik beberapa tahun terakhir diprovinsi Sumatra Barat dan sudah masuk tahap akhir. Alasan kuat dalam proses pemekaran DOB ini yaitu jauhnya akses masyarakat yang berada di Kabupaten Agam bagian timur untuk menjangkau pusat pemerintahan Kabupaten Agam sehingga muncul aspirasi masyarakat untuk pemekaran kabupaten. Pusat pemerintahan untuk DOB Kabupaten Agam Tuo akan direncanakan di Nagari Balingka Kecamatan IV Koto dengan luas perencanaan Masterplan yaitu 39 Ha, dalam perencanaan Masterplan terdiri dari beberapa kantor dinas penunjang pemerintahan termasuk kantor bupati, rumah dinas serta masjid sebagai simbol keagamaan. Penelitian ini membahas tentang perancangan kantor bupati, rumah dinas dan masjid dengan pendekatan *Institutional Design*. Dalam konsep masterplan yang dipakai adalah tigo tungku sajarangan yang merupakan konsep budaya khas Sumatra Barat, kantor bupati melambangkan niniak mamak serta masjid melambanga alim ulama. Konsep *Institutional Design* yang digunakan untuk menyeimbangkan konsep awal dengan tidak hanya menghasilkan bangunan yang fungsional tetapi memperlihatkan identitas lokal, efisiensi pelayanan publik dan berkelanjutan yang diharapkan mampu mendukung pemerintahan yang lebih lebih baik pada masa depan. Hasil perancangan menunjukkan tata ruang kawasan yang terpadu, dengan lapangan upacara sebagai pusat orientasi, didukung sistem sirkulasi yang jelas, pembagian zona kerja dan hunian yang proporsional, serta fasilitas ibadah yang ikonik. Dengan demikian, rancangan ini diharapkan mampu mewujudkan pusat pemerintahan yang inklusif, efisien, serta mencerminkan identitas lokal masyarakat Agam Tuo.

Kata Kunci: Kantor Bupati, Rumah Dinas, Daerah Otonomi Baru, Institutional design

ABSTRACT

The expansion of Agam Regency which will be divided into two regencies namely Agam Regency and the New Autonomous Region (DOB) of Agam Tuo Regency has become an interesting issue in recent years in West Sumatra Province and has entered the final stage. The strong reason for the process of expanding this DOB is the distance of access for the community in the eastern part of Agam Regency to reach the center of Agam Regency government so that the community's aspirations for the expansion of the district have emerged. The center of government for the DOB of Agam Tuo Regency will be planned in Nagari Balingka, IV Koto District with a Masterplan planning area of 39 Ha, in the Masterplan planning it consists of several government support agencies including the regent's office, official residence and mosque as a religious symbol. This study discusses the design of the regent's office, official residence and mosque with an Institutional Design approach. In the masterplan concept used is the tigo teras sajarangan which is a typical West Sumatra cultural concept, the regent's office symbolizes the niniak mamak and the mosque symbolizes the alim ulama. The Institutional Design concept is used to balance the initial concept by not only producing a functional building but also showing local identity, efficiency of public services and sustainability which is expected to be able to support a more inclusive, representative and future-oriented government. The design results demonstrate an integrated spatial layout, with a ceremonial field as the center of orientation, supported by a clear circulation system, a proportional division of work and residential zones, and iconic worship facilities. Thus, this design is expected to create an inclusive, efficient government center that reflects the local identity of the Agam Tuo community.

Keywords: *Regent's Office, Official Residence, New Autonomous Region, Institutional Design*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 dan diperkuat melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga setiap daerah dituntut untuk mampu berkembang secara mandiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki. Salah satu wujud dari kebijakan tersebut adalah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat (Isra, M., n.d.-a). Provinsi Sumatra Barat terdiri atas 19 kabupaten/kota, dengan salah satunya adalah Kabupaten Agam yang memiliki wilayah luas, kondisi geografis beragam, serta akses yang relatif jauh antarwilayah. Kondisi ini melahirkan aspirasi masyarakat untuk melakukan pemekaran menjadi DOB Kabupaten Agam Tuo, yang rencananya akan beribukota di Kecamatan IV Koto, Nagari Balingka. Realisasi DOB menuntut adanya fasilitas pemerintahan yang representatif, baik secara fungsional maupun simbolis, guna mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Badan Pusat Statistik Sumatra Barat, 24 C.E., February 12). Kabupaten Agam mempunyai wilayah yang terbentang mulai dari dataran tinggi sampai pesisir pantai. Sesuai Permendagri No 100.1.1-6117 tahun 2022 luas wilayah Kabupaten Agam mencapai 2.264,27 km², yang berada pada posisi 00° 01' 34"- 00° 28' 43" lintang selatan dan 99° 46' 39"-100° 32' 50" bujur timur. Adapun perbatasan administratif Kabupaten Agam yaitu, utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman, timur berbatasan dengan Kabupaten 50 Kota, selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang

Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar, sedangkan barat berbatasan dengan Samudra Indonesia (Sektoral, S., & Agam, K. n.d.).

Dalam konteks ini, keberadaan Kantor Bupati menjadi kebutuhan mendasar. Kantor bupati berfungsi sebagai pusat kegiatan administratif, tempat koordinasi pemerintahan, sekaligus ruang pelayanan publik bagi masyarakat. Selain itu, fasilitas pendukung berupa Rumah Dinas Bupati dan Masjid Kabupaten turut diperlukan untuk menunjang aktivitas kepala daerah serta menciptakan identitas kawasan pemerintahan. Perencanaan fasilitas-fasilitas tersebut tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan juga strategis dalam membangun legitimasi dan citra pemerintahan baru di DOB Agam Tuo (Cerdika.com. 2023, May 2).

Penelitian ini menggunakan pendekatan Institutional Design yang menekankan keselarasan antara fungsi organisasi, struktur ruang, serta tata kelola pemerintahan. Institutional Design dipilih karena mampu menjawab kebutuhan akan efisiensi tata ruang sekaligus memperhatikan transparansi, fleksibilitas, dan representasi budaya lokal dalam desain arsitektur. Dengan pendekatan ini, diharapkan perencanaan kantor bupati tidak hanya menghadirkan ruang kerja yang fungsional, tetapi juga menjadi simbol pemerintahan yang inklusif, modern, dan berorientasi masa depan. Urgensi penelitian ini terletak pada momentum pemekaran Kabupaten Agam yang sedang dalam proses realisasi. Tanpa perencanaan yang matang, pembentukan DOB berisiko menghadapi kendala dalam pelayanan publik, ketidakpastian tata ruang, serta keterlambatan pembangunan infrastruktur pemerintahan. Oleh karena itu, perancangan kantor bupati dengan pendekatan Institutional Design dapat menjadi strategi untuk mewujudkan pusat pemerintahan baru yang efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Literatur

Daerah Otonomi Baru (DOB)

Daerah Otonomi Baru merupakan bagian dari daerah pemekaran baru dari Provinsi untuk membentuk Kabupaten/Kota, atau gabungan Kabupaten/Kota untuk membentuk Provinsi baru [5]. Pemekaran menjadi tuntutan dan trend Ketika Undang Undang Pemerintah Daerah dilakukan revisi, dari Undang Undang No 5 Tahun 1974 menjadi Undang Undang No 22 Tahun 1999 serta Undang Undang No 32 Tahun 2004 dan Undang Undang No 23 Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Perubahan di Undang Undang No 2 tahun 2015 (Tauhid, K., & Gautama, ; |. 2024 Vol. 3).

Pusat Pemerintahan

Pusat pemerintahan merupakan tempat untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan, baik itu kegiatan politik dan administratif, serta segala kegiatan yang berkaitan dengan hal hal yang mengenai politik dan pemerintahan. Pusat pemerintahan tersebut selain sebagai pusat dari struktur ruang kota, dapat juga dipahami sebagai pusat kegiatan dari suatu kota atau wilayah bahkan suatu negara. Permasalahan yang sering terjadi pada Kawasan pusat pemerintahan adalah tidak terciptanya kawasan pemerintahan yang kuat dan konsisten. Disisi lain masalah yang timbul yaitu terjadinya ketidakteraturan, ketidakefisienan dan tersendatnya proses kegiatan pemerintahan yang akibatnya berdampak pula terhadap pelayanan masyarakat (Rizkika, C., Studi Hukum, P., & Ypm, S. 2023b Vol. 1, Issue 1).

Gedung Negara

Dalam peraturan Menteri tentang pedoman pembangunan bangunan gedung negara. Bangunan gedung negara adalah sebuah bangunan gedung yang digunakan untuk keperluan

dinas serta menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD dan prolehan lainnya.

Pembangunan gedung negara merupakan kegiatan mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasannya, baik dalam pembangunan gedung baru, perawatan ataupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada atau lanjutan pembangunan gedung.

Kantor Bupati

Kantor bupati adalah bangunan tempat kepala daerah tingkat kabupaten melakukan pelayanan pemerintahan ataupun administrasi kepada masyarakat di wilayah administrasinya. Kantor bupati juga merupakan sebuah kantor pemerintahan yang ada ditingkat kabupaten, dimana kantor tersebut menjadi pusat kegiatan bagi seorang bupati untuk melakukan segala bentuk kegiatan kerjanya dalam mengatur wilayah administrasi kabupaten (Ode, L., 2024).

Institutional Design

Menurut (Ridha dan Basuki 2012) institusional adalah sebuah proses organisasi dalam menetapkan suatu karakter yang ditentukan oleh komitmen organisasi yang berdasarkan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Secara terminology institusi berasal dari kata institusi, banyak definisi yang diberikan mengenai istilah institusi. Para peneliti lebih cenderung untuk mengemukakan karakteristik dari apa yang dimaksud dengan institusi (Darono, A., n.d.). Menurut (Ridha dan Basuki 2012) institusional memiliki prinsip prinsip yang menjadi dasarnya yaitu efisien, akuntabilitas, fleksibilitas dan transparansi.

Landasan dan Kriteria Pendekatan Institutionaal Design

Institutional Design memiliki landasan serta pendekatan yang cukup berpengaruh dalam proses mendesain yaitu, Teori institusional adalah salah satu teori yang sering digunakan untuk memahami perilaku individu dan organisasi (Dacim, Googstein, & Scott, 2002). Teori ini awalnya menjelaskan bagaimana struktur yang telah dilembagakan mempengaruhi proses-proses dalam organisasi. Logika institusional adalah suatu kerangka metateoris yang mempelajari interaksi antara Lembaga, individu dan organisasi dalam konteks sosial, teori ini mengkaji konstruksi sosial, pola historis dari pihak material serta asumsi, nilai-nilai, kepercayaan dan aturan aturan yang digunakan oleh individu dalam memperoleh penghidupan, mengatur ruang dan waktu serta memberikan makna terhadap realitas sosial mereka. Berikutnya adalah *isomorphism*, organisasi tidak hanya bersaing untuk memperoleh sumber daya dan pelanggan, tetapi juga untuk mendapatkan kekuatan politik, legitimasi institusional dan kepentingan sosial (DiMaggio & Powell, 1983). DiMaggio & Powell, (1983) mengidentifikasi terdapat tiga mekanisme terjadinya isomorphic change yaitu coercive isomorphism, normative isomorphism dan memetic isomorphism (Perbendaharaan, J., n.d.).

Kriteria pendekatan institusional mengacu pada elemen-elemen yang perlu dipertimbangkan seperti sistem, struktur atau lingkungan yang selaras dengan nilai, misi dan tujuan suatu institusi. Institusional menekankan pada pentingnya integritas fisik, sosial dan budaya dalam mendukung efisiensi operasional dan identitas. Menurut (DiMaggio & Powell, 1983) pendekatan institusional harus memiliki structural yang tertata dan juga efisiensi yang mendukung segala aktivitas yang berguna untuk mempermudah mencapai suatu tujuan. Menurut (Greenwood & Suddaby, 2006) institusi harus mampu beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan sosial dan politik, selain itu institusi harus fleksibel dan mampu berkembang seiring waktu.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian perencanaan kantor bupati ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan jenis penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alaminya, dengan penekanan pada pengumpulan data melalui pihak terkait ataupun studi literatur.

Dalam tahapan penelitian dilakukan pengumpulan data dengan dua metode yaitu pengumpulan data primer dan sekunder dengan melakukan sesi wawancara bersama pihak dinas PUTR Kabupaten Agam serta melakukan observasi lokasi perencanaan pusat pemerintahan, melakukan studi literatur, studi preseden dan melalui media online yang tersedia. Setelah beberapa data terkumpul kemudian melakukan analisa data dengan beberapa metode diantaranya deskriptif kualitatif, kualitatif sederhana, special dan analisa programatik untuk mendapatkan kondisi tapak perencanaan, besaran ruang serta kapasitas yang memenuhi standar, pola sirkulasi, zoning, penempatan bangunan dan hubungan antar ruang, baik ruang luar ataupun ruang dalam.

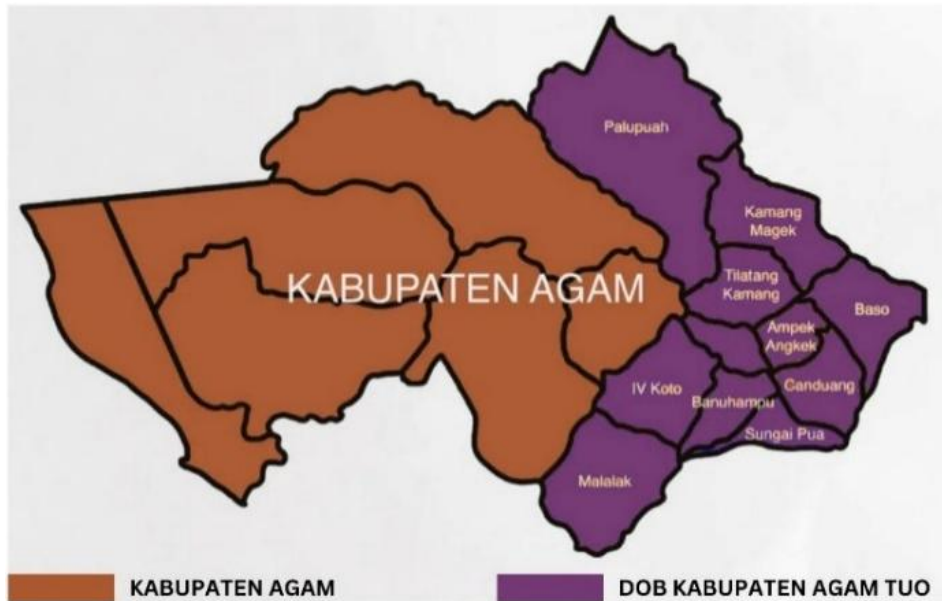
Setelah analisis mengenai tapak selesai, kemudian dilakukan tahap perancangan konsep dan perancangan tapak. Dalam proses ini menjelaskan bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikan konsep arsitektur yang digunakan yaitu Tigo Tungku Sajaringan dengan konsep Institutional Design dalam sebuah penataan tapak dan bangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Daerah yang akan menjadi DOB Kabupaten Agam Tuo

Pemekaran DOB Kabupaten Agam Tuo meliputi 10 kecamatan diantaranya yaitu:

1. Kecamatan Tilatang Kamang
2. Kecamatan Baso
3. Kecamatan Canduang
4. Kecamatan Sungai Pu
5. Kecamatan Ampek Angkek
6. Kecamatan Banuhampu
7. Kecamatan Palupua
8. Kecamatan Malalak
9. Kecamatan Kamang Magek
10. Kecamatan IV koto

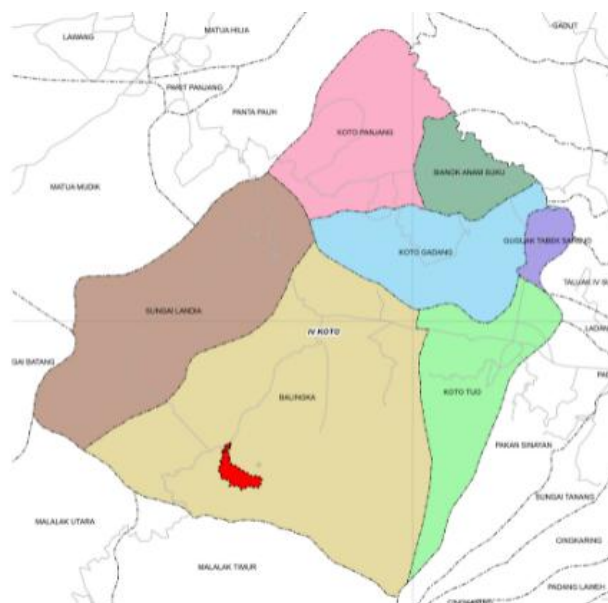


Gambar 1 Peta Pembagian DOB Kab. Agam Tuo

Sumber: https://www.instagram.com/langgam.id/p/C4zeGJxrOSZ/?img_index=1

Lokasi Pusat Pemerintahan

Lokasi Pusat Pemerintahan DOB Kabupaten Agam Tuo berada di Kecamatan IV Koto, Nagari Balingka. Pemilihan nagari balingka merupakan hasil dari kajian uji lapangan tim ahli yang diarahkan oleh DPRD Provinsi Sumatra Barat. Sebelumnya ada tiga daerah yang diajukan untuk menjadi pusat pemerintahan, namun nagari balingka adalah satu satunya nagari yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan maka dari itu nagari balingka dipilih untuk menjadi lokasi pusat pemerintahan DOB Kabupaten Agam Tuo.



Gambar 2 Peta Kec. IV Koto

Sumber: Dinas PUTR Agam

Deskripsi tapak

Lokasi tapak penelitian berada didalam Kawasan Masterplan perencanaan pusat pemerintahan baru DOB Agam tuo, dengan luas pusat pemerintahan yaitu 39 Ha dan luas tapak penelitian $\pm 16,759$ m².



Gambar 3 Materplan Pusat Pemerintahan
Sumber: Dinas PUTR Agam

Batasan tapak

Barat : Hutan
Timur : Dinas Lingkungan Hidup
Utara : Jalan Utama, Alun alun dan DPRD
Selatan : Hutan

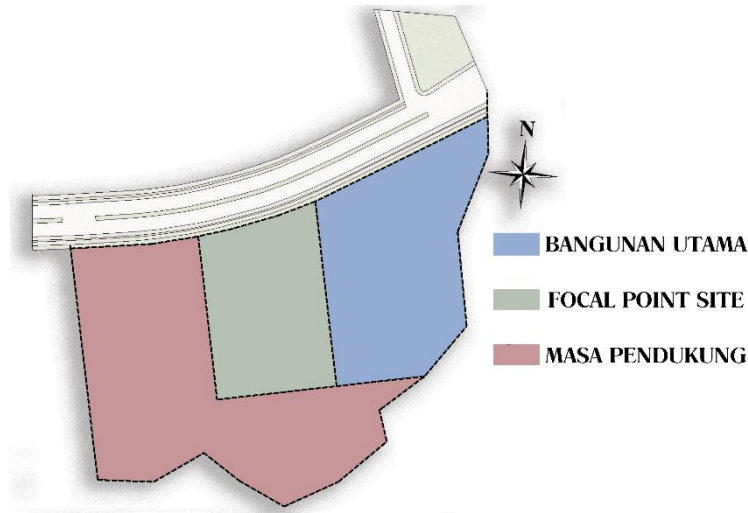
Konsep Tapak

Konsep tapak didapatkan melalui studi analisis menggunakan 11 elemen tapak, dari studi analisis ini didapatkan bagaimana konsep tapak yang akan digunaka, Hasil konsep tapak merupakan bentuk konsep yang akan diterapkan dalam desain perancangan, dari dari konsep tapak sendiri berupa olahan konsep pada view, konsep pada kebisingan, konsep pada iklim, dan konsep pada sirkulasi yang akan digunakan pada desain perancangan. Berikut hasil dari konsep tapak yang dijabarkan melalui bentuk superimpose.

Sumber: Penulis 2025

Zoning Makro Kawasan

Zoning makro merupakan pembagian tapak secara garis besar yang dimana untuk menentukan dimana posisi bangunan akan diterapkan pada proses perancangan. Zoning makro ini berfungsi untuk memudahkan pembagian fungsi pada tapak dan perletakan bangunan pada saat perencanaan. Zoning makro didapat melalui sebuah analisa konsep ruang luar, pada zoning makro ini ruang luar tapak dibagi menjadi tiga fungsi yaitu fungsi bangunan utama, fungsi bangunan pendukung dan fungsi focalpoint tapak.

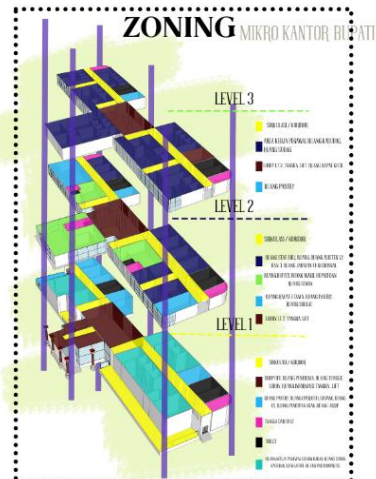
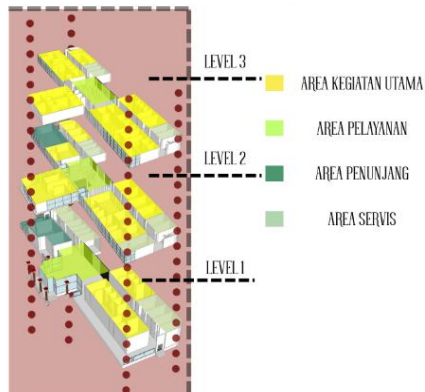


Gambar 6 Zoning Makro
Sumber: Penulis 2025

Konsep Zoning Mikro

Zoning mikro merupakan pembagiann area ruang dalam pada bangunan, seperti area kegiatan utama, area pelayanan, area penunjang dan area servis. Pembagian zoning ini berfungsi untuk memudahkan dalam penyusunan ruang dalam pada bangunan. Dari zoning mikro, bangunan utama memiliki tiga elevasi lantai dan dibagi menjadi tiga area yaitu lantai satu sebagai area pelayanan dan area servis, dilantai dua sebagai area kegiatan utama dan penunjang serta dilantai tiga sebagai area kegiatan utama. Zoning mikro juga akan menjelaskan posisi perletakan ruang dalam bangunan secara detail mulai dari fungsi utama, penunjang, hingga servis area. Pada penzoningan ini juga akan menentukan bagaimana pola sirkulasi dalam bangunan.

ZONING MAKRO KANTOR BUPATI

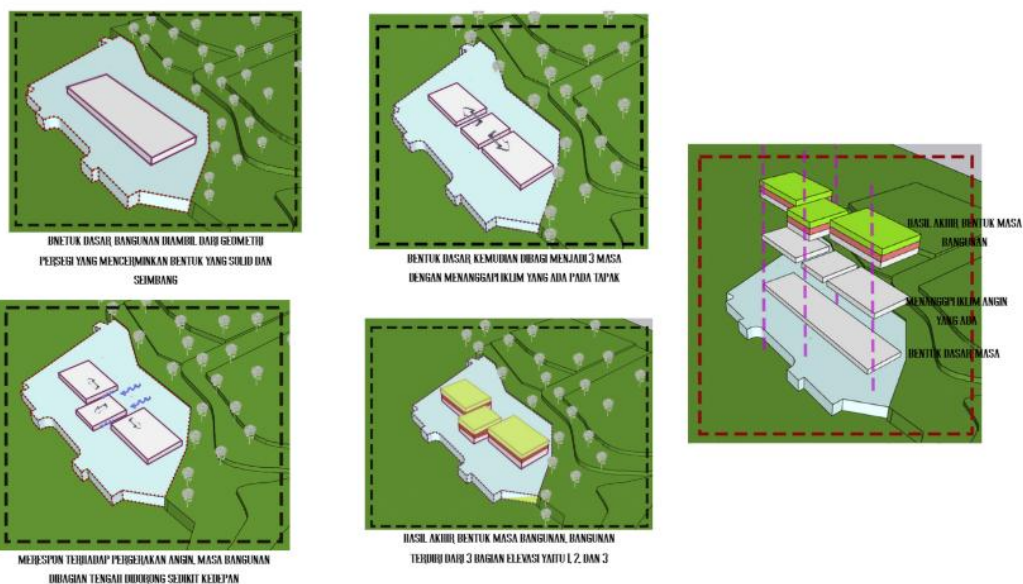


Gambar 7 Zoning Mikro
Sumber: Penulis 2025

Konsep Masa Bangunan

Konsep masa bangunan merupakan hasil dari analisa pada tapak, analisa bentuk sehingga masa bisa mencerminkan identitas pemerintahan yang monumental serta menekankan unsur unsur yang sesuai dengan fungsi. Pemeilihan bentuk juga berasal dari analisa preseden serta analisa tapak yang bagaimana pada tapak angin berasal dari arah timur menuju barat sehingga masa bangunan dibagi menjadi tiga masa untuk memberikan sirkulasi udara alami menuju dalam bangunan. Bentuk masa bangunan juga dibuat simetris yang merupakan simbol dari sebuah bangunan kantor pemerintahan. Bentuk dasar bangunan diambil dari bentuk persegi yang dibagi menjadi tiga masa, pengulangan dan penggabungan bentuk nantinya akan menciptakan sebuah bentuk massa serta pola ruang yang dibutuhkan, dengan itu massa bangunan yang tercipta akan juga menciptakan susunan pola ruang yang efisien. Berikut merupakan konsep masa yang dihasilkan.

KONSEP BENTUK DAN MASA BANGUNAN



Gambar 8 Konsep Masa Bangunan Utama

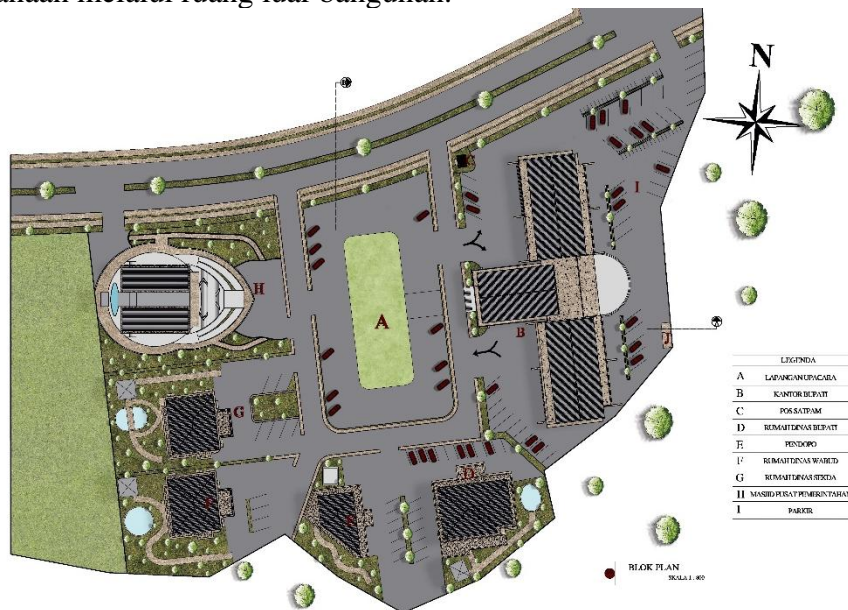
Sumber: Penulis 2025

Dari konsep massa diatas, ketiga masa dipisahkan yang berguna untuk melancarkan sirkulasi angin dari arah timur menuju kedalam bangunan, sehingga bangunan mendapatkan sirkulasi angin alami. Masa bangunan yang berada dibagian tengah sedikit didorong kearah depan untuk supaya bangunan memiliki focalpoint dan cerminan bangunan yang monumental.

Implementasi

Blok Plan

Blok Plan merupakan hasil dari pengembangan konsep tapak dan penempatan posisi bangunan, Orientasi bangunan dan area difungsikan sesuai dengan kebutuhan administrasi, pelayanan, serta kegiatan masyarakat. Pada blok plan memperlihatkan apa saja yang terlihat didalam tapak perencanaan melalui ruang luar bangunan.



Gambar 8 Blok Plan
Sumber: Penulis 2025

(A) Merupakan lapangan upacara terletak di bagian tengah kawasan dengan bentuk persegi panjang yang dikelilingi area sirkulasi kendaraan. Posisi lapangan ini sangat strategis karena menjadi pusat kegiatan upacara resmi dan kegiatan seremonial. Akses menuju lapangan mudah dijangkau dari segala sisi kawasan. (B) Bangunan kantor bupati terletak di sisi kanan lapangan upacara. Desain bangunan dibuat representatif, menunjukkan fungsi utama sebagai pusat administrasi dan pemerintahan. Lokasinya yang dekat dengan lapangan memudahkan pelaksanaan acara kenegaraan atau kegiatan resmi yang melibatkan kepala daerah. (C) Pos pengamanan utama untuk kantor bupati, sekaligus penjaga pintu masuk utama ke dalam tapak kantor bupati. (D) Rumah dinas bupati Terletak agak terpisah dari area perkantoran, rumah dinas bupati memiliki akses yang cukup privat dengan jalur masuk tersendiri. Hal ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan sekaligus mempermudah mobilitas kepala daerah. Pada rumah dinas bupati bergandeng langsung dengan pendopo, pendopo berfungsi sebagai tempat penerima tamu bagi bupati ataupun tamu pemerintahan lainnya. Rumah dinas bupati dan pendopo memiliki area parkir sendiri yang berguna untuk mempermudah akses menuju bangunan. (F) dan (G) Rumah dinas wakil bupati dan sekretaris daerah juga terpisah dari area perkantoran, lebih tepatnya didepan area kantor bupati. Rumah dinas wakil bupati dan sekretaris daerah juga memiliki area parkir tersendiri. (H) Masjid pusat pemerintahan terletak

diarea depaan tapak, Masjid direncanakan dengan bentuk yang menonjol dan khas pada sisi kiri blok plan, keberadaannya berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan pegawai dan masyarakat, sekaligus memperkuat identitas kawasan pemerintahan yang religius. (I) Area parkir yang berada didalam Kawasan, parkir tak hanya terletak dibelakang area kantor bupati tetapi juga diarea lapangan upacara yang memang di rancang dengan area yang memiliki fleksibilitas yang tinggi.

Secara keseluruhan, blok plan ini memperlihatkan tata letak yang terorganisasi dengan baik, mengutamakan, fungsionalitas setiap bangunan memiliki akses yang jelas dan muda, keterpusatan, lapangan upacara sebagai titik sentral Kawasan, keseimbangan perkantoran, rumah dinas, dan fasilitas umum ditempatkan dengan jarak yang proporsional. Kenyamanan dan identitas kehadiran masjid dan ruang terbuka hijau mendukung suasana yang nyaman dan bernuansa pemerintahan yang humanis.

Site Plan

Site plan merupakan hasil dari pengembangan antara konsep ruang luar dengan ruang alam. Site plan memperlihatkan bagaimana hubungan, keadaan, dan posisi ruang dalam dengan ruang luar apakah memiliki sikronisasi atau tidak. Site plan ini merupakan hasil perancangan kawasan pusat pemerintahan yang direncanakan di Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam Tuo. Tata letak kawasan dirancang dengan mempertimbangkan aspek fungsi, aksesibilitas, kenyamanan, serta filosofi budaya lokal.



Gambar 10 Site Plan
Sumber: Penulis 2025

Pada site plan tidak hanya memperlihatkan hubungan antara ruang luar dengan ruang dalam, tetapi memperlihatkan kondisi dan fungsi pada lantai satu bangunan. Pada lantai satu bangunan memperlihatkan pola susunan ruang, pola sirkulasi dan entrance masuk kedalam bangunan.

Eksterior

Berikut merupakan perspektif interior Kawasan perencanaaan, pada perspektif ini terlihat begitu jelas lapangan upacara sebagai focailpoint tapak berada ditengah tapak dan kantor

bupati mencerminkan identitas budaya daerah yang kuat. Pada perspektif ini memperlihatkan kondisi seluruh tapak pada Kawasan perencanaan yang telah direncanakan.



Gambar 11 Perspektif Mata Burung
Sumber: Penulis 2025



Gambar 12 Perspektif Mata Manusia
Sumber: Penulis 2025

Interior

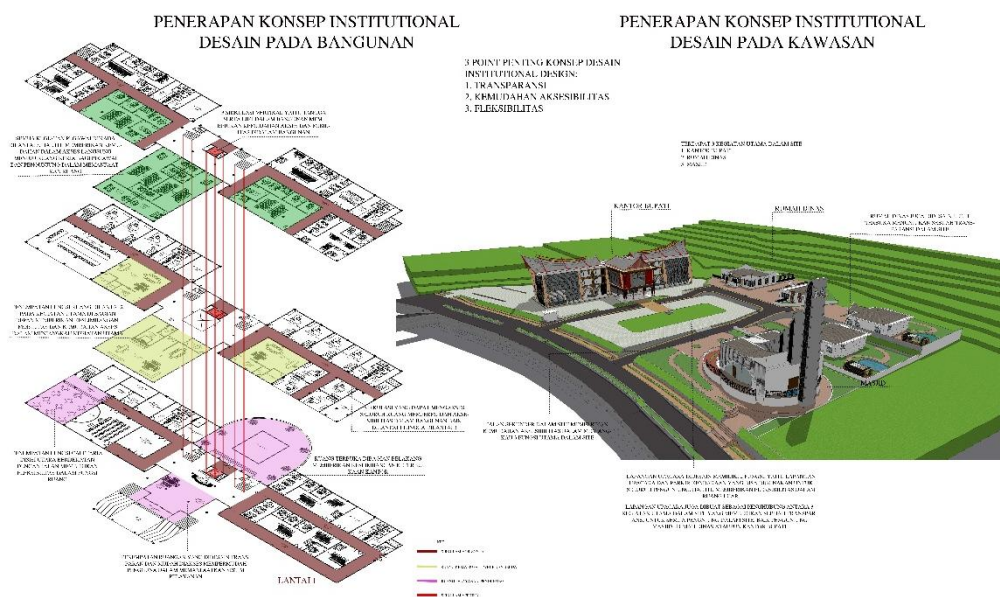
Gambar interior merupakan ruang kerja kepala bagian, pegawai dan ruang rapat utama yang ada didalam kantor bupati, merupakan sebuah cerminan kantor pemerintahan yang modern dan fleksibel. Setiap ruang kerja pegawai dirancang dengan tingkat fleksibilitas ruang yang tinggi sehingga bisa memudahkan beberapa aktifitas dilakukan didalamnya, selain itu ruang seluruh ruang kerja dilengkapi dengan teknologi layar untuk menampilkan hasil kerja.



Gambar 13 Interior
Sumber: Penulis 2025

Penerapan Pada Konsep

Berikut merupakan penjabaran mengenai konsep *Institutional Design*. Dalam penerapannya, konsep *Institutional Design* tidak hanya diterapkan dalam bangunan saja tetapi juga perletakan bangunan dan olahan tapak pada saat proses perancangan. Pada ruang dalam bangunan, konsep diterapkan dalam penyusunan ruang yang cukup jelas, sirkulasi horizontal dan vertikal didalam bangunan juga mudah untuk mengakses segala sisi bangunan. Penempatan ruang menyesuaikan penzoningan yang telah dilakukan seperti area terbuka dan publik, area kegiatan utama dan area pendukung diperjelas.



Gambar 14 Penerapan Konsep
Sumber: Penulis 2025

Kesimpulan

Pemekaran suatu daerah menjadi Daerah Otonomi Baru merupakan sebuah kesempatan dan keleluasaan bagi setiap daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan otonomi daerahnya masing masing. Di Indonesia pemekaran daerah menjadi daerah baru sudah diberlakukan sejak tahun 2001 dan diperkuat dengan UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Di Provinsi Sumatra Barat sendiri sudah ada beberapa daerah yang dimekarkan mengikuti

perintah yang sudah tertuang di undang-undang, salah satu yang terbaru yaitu kabupaten Agam yang akan dimekarkan menjadi dua Kawasan yaitu Daerah Otonomi Baru Agam Tuo. Pemekaran ini dilakukan dengan berbagai isu dan kajian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Agam dan Provinsi Sumatra Barat.

Setelah melakukan kajian dan persetujuan pihak-pihak terkait, pemerintah kabupaten agam sudah menyiapkan lokasi serta masterplan yang akan direncanakan sebagai pusat pemerintahan daerah otonomi baru agam tuo. Dalam sebuah pusat pemerintahan tersebut, terdapat perencanaan kantor bupati dan masjid yang digunakan sebagai kantor serta pusat ibadah bagi pusat pemerintahan. Kantor bupati dan masjid merupakan sebuah bangunan yang dijadikan sebagai landmark pusat pemerintahan. Didalam sebuah kantor bupati terdapat beberapa asisten, bagian bagian bidang terkait dan staf ahli terkait yang perlu diberi ruang untuk menjalankan tugasnya. Sarana kantor bupati ini diharapkan dapat memenuhi segala kegiatan bupati dan para pegawai kantor bupati yang berkaitan dengan pemerintahan bagi daerah otonomi baru serta dapat menampung segala keluhan dari masyarakat di daerah otonomi baru.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Sumatra Barat. (24 C.E., February 12). Jumlah Nagari/Kelurahan/Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2021-2023. BADAN PUSAT STATISTIK SUMATRA BARAT. <https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjI3IzI=/jumlah-nagari-kelurahan-desa-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-barat.html>
- Cerdika.com. (2023, May 2). Tugas Bupati dan Wakil Bupati. Cerdika.Com. <https://cerdika.com/tugas-bupati-dan-wakil-bupati/>
- Darono, A., Diklat Keuangan Malang, B., & Keuangan JIAhmad Yani, K. R. (n.d.). PENGGUNAAN TEORI INSTITUSIONAL DALAM PENELITIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI INDONESIA.
- Isra, M., Arsitektur, J., Teknik, F., Oleo, H., Andrias, A., & Balo, H. (n.d.-a). PERENCANAAN KANTOR BUPATI KONAWE KEPULAUAN.
- Ode, L., Sahrayen, A., Faslih, A., Said, ; Burhan, Bahri, A., Arsitektur, M. J., Universitas, F., Kendari, H. O., Pendidik, T., Arsitektur, J., Teknik, F., Halu, U., & Kendari, O. (2024). PERENCANAAN KANTOR BUPATI KABUPATEN BUTON SELATAN DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR NEO VERNAKULAR.
- Perbendaharaan, J., Negara Dan Kebijakan Publik, K., & Kisworo Elvia Rosantina Shauki, J. (n.d.). INDONESIA TREASURY REVIEW TEORI INSTITUSIONAL DALAM PENYUSUNAN DAN PUBLIKASI LAPORAN TAHUNAN SEKTOR PUBLIK (STUDI KASUS PADA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA).
- Rizkika, C., Studi Hukum, P., & Ypm, S. (2023b). EFEKTIVITAS PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Vol. 1, Issue 1).
- Sektoral, S., & Agam, K. (n.d.). DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK SEKTORAL.
- Tauhid, K., & Gautama, ; |. (2024). Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua (Vol. 3).